



Aparat Samakan Persepsi Atasi KDRT

UMBULHARJO (MERAPI) - Para aparat kepolisian di Kota Yogyakarta diajak bersinergi menyamakan persepsi dalam penanganan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penyamaan persepsi itu agar tidak ada kerancuan dalam penegakan hukum dan menimbulkan persoalan baru yang berdampak buruk bagi korban KDRT.

"Kami ingin menyamakan persepsi dan pemahaman antara aparat penegak hukum, pemkot, LSM dan masyarakat soal isu kekerasan perempuan dan anak. Ini supaya dalam proses penegakan hukum agar tidak ada kerancuan," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, usai membuka workshop peningkatan kapasitas penanganan kekerasan perempuan dan anak untuk aparat hukum, Senin (26/8).

Menurutnya, pemahaman persepsi itu penting karena kini ada aturan dan pemahaman baru terkait perlindungan perempuan dan anak agar masyarakat tidak kaget.

Mengingat selama ini sebagian masyarakat menganggap kekerasan pada anak perempuan dan laki-laki sebagai kasus domestik rumah tangga yang bisa diselesaikan di rumah tangga. Tapi dengan adanya aturan terkait perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan harus diselesaikan secara hukum.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta mencatat, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga pada 2017 tercatat sebanyak 254 kasus. Sedangkan pada 2018 turun menjadi 193 kasus. Kepala DPMPPA Edy Muhammad mengatakan 1/3 korban kekerasan adalah anak dan 17 kasus kekerasan korban laki-laki.

Sementara itu Wakapolresta Yogyakarta AKBPB Ardiyan Mustakim menegaskan selama ini penanganan korban dan tersangka perempuan dan anak berbeda dengan laki-laki. Itu karena kondisi psikologi perempuan dan anak-anak berbeda dengan laki-laki. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005